

BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR: 421.5/ 299 /33/TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

Membaca

- Memorandum of Agreement (Nota Kesepakatan) tentang Pemberian Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat antara Direktorat Pendidikan Dasar
 - dan Menengah Departeman Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah.
 - Surat Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 2 Kampung Laut Nomor 017/KP-USB/VI/2007, tanggal 2 Juni 2007 perihal Laporan Pelaksanaan Pembangunan USB SMP Negeri 2 Kampung Laut dan Mohon Ijin Pendiriannya.
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor: 425.1/1707/03/33 tanggal 11 Juni 2007 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kampung Laut.

Menimbang :

Negeri.

- : a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan upaya pemerataan memperoleh pelayanan pendidikan menengah yang bermutu serta peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap, maka diperlukan adanya penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- b. banwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendirian oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, keberadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kampung Laut yang di bangun dengan dana APBN tahun 2006 dalam bentuk Block Grant dinyatakan memenuhi standar pelayanan minimal pendirian SMP Negeri, sehingga layak untuk diberi ijin pendiriannya.
- bentuk Block Grant dinyatakan memenuhi standar pelayanan minimal pendirian SMP Negeri, sehingga layak untuk diberi ijin pendiriannya.

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
- tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);